

## Permasalahan dalam Merger BTN Syariah-Bank Muamalat

Diah Ayu Tira Fitriany

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b> Give Your Opinion (April)</p>	<p>Pada September 2023, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami penurunan signifikan, dengan market share turun menjadi 7,27% dan total aset sebesar Rp. 831,95 triliun (-10,94% tahunan). Rencana merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak, termasuk penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah yang khawatir akan potensi pelanggaran prinsip syariah. Meski merger ini berpotensi menciptakan bank syariah besar yang mampu bersaing dengan entitas lain seperti BSI, terdapat kekhawatiran bahwa proses ini bisa merugikan nasabah dan pemegang saham, mengingat fokus bisnis yang berbeda dan kondisi keuangan Bank Muamalat yang kurang sehat. Analisis yang cermat diperlukan untuk memastikan merger tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga memperkuat integritas dan prinsip syariah. Sebagai mahasiswa perbankan syariah, penting bagi saya agar proses merger ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, demi menjaga keberlanjutan dan stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia.</p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Merger, BTN Syariah, Bank Muamalat</i></p>	
<p><b>Editor:</b> Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada September 2023 terjadi penurunan yang signifikan dalam *market share* bank syariah dengan aset turun menjadi Rp. 831,95 triliun (-10,94% tahunan) dan kontribusi pada pangsa pasar menurun menjadi 7,27%. Meskipun ada penurunan, masih ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam industri bank syariah. Adanya rencana merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat telah menimbulkan berbagai perdebatan dan permasalahan yang perlu diperhatikan secara seksama. Sebagai mahasiswa yang mempelajari bidang perbankan syariah, saya merasa perlu untuk memberikan pandangan terhadap isu ini, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada.

Pertama-tama, rencana merger ini memiliki potensi untuk menciptakan bank syariah besar yang mampu menjadi pesaing bagi bank syariah lainnya, seperti BSI. Dengan ukuran yang lebih besar, bank hasil merger ini dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan inovasi, meningkatkan layanan, dan memperluas jangkauan pasar. Hal ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekosistem perbankan syariah di Indonesia, serta membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih besar.

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam rencana merger ini. Salah satunya adalah penolakan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Muhammadiyah terhadap rencana merger ini. Penolakan tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap kekhawatiran terhadap konsekuensi syariah dari merger ini. MUI dan Muhammadiyah melihat adanya potensi pelanggaran prinsip syariah, seperti riba atau keuntungan yang tidak sah, yang mungkin timbul akibat merger ini. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menolak rencana merger BTN Syariah dengan PT Bank Muamalat Indonesia dengan dua alasan. (CNN Indonesia/ Muhammad Arief).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menolak rencana penggabungan usaha antara PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Menurutnya, BMI harus tetap mempertahankan paradigma dari umat, milik umat, bersama umat, dan untuk umat. Anwar menegaskan bahwa BMI, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, adalah bank swasta milik umat yang berbeda dengan bank-bank syariah lainnya yang berinduk kepada bank konvensional. Ia menyoroti pentingnya menjaga warisan para pendiri BMI yang berasal dari kalangan umat, serta mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan bisnis saja dalam mengatasi masalah BMI, tetapi juga memperhatikan dan mempertahankan sejarah serta keberadaan bank syariah swasta yang merupakan milik umat. Anwar menekankan bahwa langkah pemerintah seharusnya bukanlah mencaplok BMI menjadi bank milik negara, melainkan membuat situasi dan kondisi yang mendukung agar BMI tetap menjadi bank milik umat yang kuat, maju, terpercaya, dan dibanggakan.

Selain itu, terdapat anggapan bahwa merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat dapat dianggap sebagai "kawin paksa" karena keduanya memiliki fokus bisnis yang berbeda. BTN Syariah lebih fokus pada pembiayaan perumahan syariah, sementara Bank Muamalat memiliki fokus yang lebih luas, termasuk pembiayaan mikro dan konsumsi. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa merger ini dilakukan atas dasar kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak manapun, termasuk nasabah dan pemegang saham.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi Bank Muamalat yang saat ini dikabarkan tidak sehat secara finansial. Jika merger dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, hal ini dapat berpotensi membawa risiko bagi stabilitas sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat terhadap kondisi keuangan dan operasional kedua bank sebelum melakukan langkah merger yang besar ini.

Dalam konteks perbankan syariah, keberlangsungan operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sebelum melakukan merger, BTN Syariah dan Bank Muamalat perlu memastikan bahwa merger ini tidak hanya akan membawa manfaat finansial, tetapi juga akan memperkuat integritas dan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Sebagai mahasiswa perbankan syariah, saya berharap bahwa rencana merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat dapat dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, serta memperhatikan semua aspek yang terkait. Dengan demikian, merger ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus memperkuat integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam industri perbankan syariah secara keseluruhan.

## REFERENSI

- Romys, Bineksari. "Kabar Terbaru Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat" CNBC Indonesia, 26 Apr. 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240426081728-17-533595/kabar-terbaru-merger-btn-syariah-dan-bank-muamalat>. Accessed 09 Okt. 2024.
- Khairina. "Korupsi Dana Desa Dan BLT Covid-19, Kades Dan Bendahara Di Toraja Utara Ditahan Kejari." *KOMPAS.Com*, CNBC Indonesia, 26 Oct. 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240424070730-17-532820/bank-muamalat-beberkan-update-terbaru-soal-merger-dengan-btn-syariah>. Accessed 09 Okt. 2024